

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Nilai Demokrasi

1. Pengertian Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga ataupun sesuatu yang dianggap bermutu, sehingga berguna bagi manusia. Nilai merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh sekelompok orang yang mempercayainya. Sjarkawi (2006: 29) mengatakan bahwa nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Objek kepentingan yang dimaksudkan adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap orang. Setiap orang membutuhkan nilai yang digunakan untuk mengatur kehidupan sehari-hari dalam bertindak.

Nilai sering disebut juga dengan aturan, di mana peraturan dibuat untuk mengatur tindakan manusia agar tertib dan teratur. Peraturan digunakan untuk mengatur tingkah laku seseorang agar tidak berperilaku sewenang-wenang dan tanpa kendali, sehingga membuat perilaku masyarakat di daerah tertentu menjadi lebih baik. Aturan berisi hal baik yang harus dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari. Hal senada diungkapkan oleh Nurul Zuriah (2007: 19) yang mengemukakan bahwa nilai adalah pola keyakinan suatu masyarakat tentang hal baik yang harus dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari dalam berperilaku. Masyarakat harus mengenali, memilih, dan menetapkan nilai-nilai apa saja yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dan menjadi kebiasaan dalam hidup bermasyarakat.

Segala sesuatu yang berharga dianggap nilai. Setiap yang berharga akan dicari oleh manusia, seperti yang diungkapkan oleh Paul Suparno, dkk (2006: 75) yang menyatakan bahwa nilai adalah hakikat sesuatu yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia. Keinginan untuk hidup dalam kedamaian dan keteraturan, manusia menjadikan nilai sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Nilai menjadi dasar dalam membuat tata aturan dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada di satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Nilai dalam suatu daerah dipengaruhi oleh norma, keyakinan dan kebudayaan masing-masing meskipun untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu perdamaian dan ketenteraman.

Bertens (Paul Suparno, 2006: 76) menambahkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan dan sesuatu yang baik. Nilai membuat kehidupan manusia menjadi lebih teratur, hal ini disebabkan karena nilai merupakan anugerah Tuhan yang artinya setiap manusia dianugerahi hal yang sama pada waktu dilahirkan. Perkembangan aspek nilai selanjutnya dipengaruhi masyarakat di mana dia tinggal. Manusia hanya dapat menemukan, memahami, menghayati, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata.

Nilai merupakan hal yang melekat pada objek sehingga disukai dan dicari oleh banyak orang. Suatu objek akan bernilai jika ada subjek yang memberikan penilaian terhadap objek tersebut. Baik dan buruk penilaian yang diberikan pada suatu objek, tergantung dari aturan yang berlaku di

masyarakat dan pengalaman orang yang memberikan penilaian. Nilai dijadikan suatu pijakan dan dipegang teguh oleh masyarakat menjadi suatu keyakinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu hal baik yang diinginkan oleh setiap orang dan dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia. Nilai menjadi seperangkat aturan yang harus dipatuhi demi kepentingan bersama yaitu kehidupan yang tertib dan nyaman. Nilai dijadikan manusia sebagai faktor pendorong dan pedoman dalam mencapai tujuan kehidupan. Oleh karena itu perlu melakukan pengajaran nilai sejak dini untuk menjaga stabilitas kebudayaan dari generasi ke generasi.

2. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi sering digunakan dalam sistem pemerintahan. Negara yang demokrasi merupakan negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya. Rakyat dilibatkan dalam menentukan setiap kebijakan dalam pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh Abd. Rahman Assegaf (2004: 140) yang mendefinisikan demokrasi dari asal usul kata yaitu berasal dari kata *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* yang artinya kekuasaan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Harris Soche (Winarno, 2010: 91), demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain.

Terdapat pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer, yaitu pengertian demokrasi dari Abraham Lincoln (Winarno, 2010: 92) yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of people, by the people, and for the people*). Pengertian pemerintahan dari rakyat, suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui demokrasi, pemilihan umum. Pengertian pemerintahan oleh rakyat yaitu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan dorongan pribadi. Roda pemerintahan berada pada pengawasan rakyat baik secara langsung maupun perwakilan. Pengertian pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Winarno (2007: 102) mengungkapkan bahwa Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Pancasila menjadi cita-cita masyarakat, sehingga dijadikan pedoman dalam membuat keputusan. Selain itu, Pancasila menjadi alat pemersatu yang mampu menjadi sumber nilai bagi penyelesaian konflik yang dihadapi masyarakat. Nilai-nilai dalam setiap sila pada Pancasila memuat nilai demokrasi, sehingga dijadikan sumber untuk menjalankan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan demokrasi adalah suatu sistem atau tatanan pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada

rakyat. Kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat, meliputi pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi pancasila di mana nilai-nilai dalam pancasila digunakan sebagai sumber dalam menjalankan pemerintahan.

3. Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi telah ada sebelum Indonesia merdeka. Penanaman nilai demokrasi pada masa sekarang ini bisa ditanamkan sejak dini melalui kegiatan saling menghargai satu sama lain. Negara yang demokrasi akan terwujud apabila seluruh warga masyarakatnya mempunyai nilai-nilai demokrasi. Perilaku dan budaya demokrasi juga harus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun budaya demokrasi tidak cukup dengan membuat peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, akan tetapi juga perlu mengenalkan atau mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Saiful Arif (2007, 58-59) mengatakan bahwa demokrasi tidak sebatas sistem politik maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai demokrasi seperti, penghormatan terhadap sesama, toleransi, penghargaan atas pendapat orang lain dan kesamaan sebagai warga dan menolak adanya diskriminasi. Hal senada dikemukakan oleh Paul Suparno (2004: 37) yang menyatakan bahwa nilai demokrasi merupakan nilai yang membentuk sikap tidak diskriminatif. Demokrasi menjunjung tinggi kesamaan hak setiap orang, yang artinya hak

dirinya dan orang lain sama. Demokrasi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dan bekerjasama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di mata negara tanpa menghiraukan latar belakang suku, ras, agama, tingkatan sosial, dan gender. Demokrasi tidak memperbolehkan terjadinya penindasan baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Nilai demokrasi mengajarkan individu untuk saling menghormati satu sama lain.

Senada dengan pendapat Zamroni (2001: 32) yang menyebutkan nilai demokrasi yaitu, a) toleransi, b) kebebasan mengemukakan pendapat, c) menghormati perbedaan pendapat, d) memahami keanekaragaman dalam masyarakat, e) terbuka dalam komunikasi, f) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, g) percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain, h) saling menghargai, i) mampu mengekang diri, j) kebersamaan, dan k) keseimbangan. Nilai demokrasi tidak secara langsung ditanamkan pada diri seseorang, melainkan tahap demi tahap. Nilai demokrasi yang menjadi fokus penelitian ini meliputi nilai berpartisipasi, toleransi dan saling menghargai.

a. Partisipasi

Zamroni (2009: 55) menyatakan bahwa partisipasi menekankan bahwa dalam masyarakat yang demokratis, setiap individu harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Setiap orang berhak dan wajib memberikan suara sebagai perwujudan partisipasi dalam menentukan kebijakan. Partisipasi mencerminkan kesadaran individu untuk melaksanakan kewajiban atas hak yang dimiliki.

b. Toleransi

Sri Narwanti (2011: 29) menyatakan bahwa toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Terdapat indikator sikap toleransi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Pelayanan yang sama terhadap siswa tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, status sosial dan status ekonomi.
- 2) Memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus.
- 3) Bekerja dalam kelompok dengan teman-teman yang berbeda jenis kelamin, agama, suku, dan tingkat kemampuan.
- 4) Tidak memaksakan pendapat/kehendak kepada orang lain.
- 5) Hormat-menghormati.
- 6) Mempunyai perasaan malu jika berbuat kesalahan, takut jika melanggar peraturan, senang jika berbuat kebaikan.
- 7) Basa-basi (ramah).
- 8) Sopan santu.
- 9) Bersuara sewajarnya dan tidak sombong.

c. Saling menghormati

Nurul Zuriah (2007: 69) mengungkapkan bahwa saling menghargai/menghormati adalah sikap dan perilaku untuk menghargai dalam hubungan antar individu dan kelompok berdasarkan norma dan tata cara yang berlaku. Setiap orang harus mempunyai rasa saling menghargai satu sama lain tanpa melihat dari latar belakang sosialnya. Rasa saling menghargai tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti menyapa, senyum, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan haknya, dan lain sebagainya.

Menghormati perbedaan pendapat merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Tidak memaksakan pendapatnya

sendiri meskipun pendapat itu berbeda dengan orang lain. Jika terdapat perbedaan, hendaknya diputuskan dengan musyawarah untuk mufakat tanpa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai demokrasi adalah suatu pola keyakinan atau hal baik yang dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Nilai demokrasi dalam penelitian ini dibatasi pada nilai partisipasi, toleransi dan saling menghormati.

B. Pelaksanaan Nilai Demokrasi di Sekolah

Pendidikan demokrasi diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi, karena keberhasilan suatu negara dalam menjalankan demokrasi ditentukan oleh pemerintahan yang demokrasi dan masyarakat yang mengembangkan nilai demokrasi dalam kehidupannya. Penanaman nilai demokrasi dapat dilakukan sejak anak masih kecil. Pendidikan demokrasi pertama kali dilakukan di lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dalam kehidupannya. Keluarga sangat mempengaruhi perkembangan nilai demokrasi dalam diri anak karena di dalam keluarga hidup berbagai macam nilai demokrasi yang dilakukan setiap harinya. Keluarga hanya mampu membimbing anak sampai usia lima sampai tujuh tahun, setelah itu anak akan belajar mengembangkan dirinya di sekolah.

Sekolah bertugas mendidik anak untuk mengembangkan potensi dan nilai yang dibawa dari keluarga, oleh karena itu sekolah mempunyai tujuan untuk mengembangkan siswa sesuai dengan keinginan masyarakat dan

negara. Sekolah demokratis akan menanamkan nilai demokrasi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Zamroni (2001: 9) mengatakan pendidikan yang demokratis harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Pendidikan demokrasi dilakukan untuk mencetak penerus bangsa yang mempunyai nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya untuk dapat melanjutkan kelangsungan demokrasi dalam suatu negara.

Jika Zamroni mendefinisikan pendidikan demokrasi dari segi lulusan, Abd. Rahman Assegaf menekankan pendidikan demokrasi pada proses pelaksanaannya. Pendidikan demokrasi menurut Abd. Rahman Assegaf (2004: 140-141) adalah pendidikan yang menerapkan sistem andragogi yaitu menuntut keaktifan siswa untuk berbuat. Sekolah berperan untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat siswa serta memfasilitasi keanekaragaman karakter siswa. Sekolah bertugas mendidik, mengajar, dan memperbaiki serta memperhalus tingkah laku siswa yang dibawa dari keluarga. Sekolah tidak seharusnya memaksakan kehendak kepada siswa. Pemaksaan di sekolah akan menumbuhkan frustrasi yang berakibat pada menurunnya rasa percaya diri, keputusasaan, dan terjadinya kekerasan satu dengan yang lain.

Penanaman nilai demokrasi hendaknya dilakukan kepada siswa sedini mungkin untuk membentuk kepribadian anak. Penanaman nilai demokrasi ditransformasikan oleh guru melalui kegiatan belajar mengajar. Ivonna Indah

dkk (2003: 69) mengungkapkan bahwa penanaman nilai demokrasi dapat diawali dengan aksi-aksi yang sederhana, seperti memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas menggambar, mengamati, dan mendiskusikan gambar. Setiap anak akan menghasilkan jawaban yang berbeda satu sama lainnya. Penanaman nilai hendaknya dilakukan tahap demi tahap dan harus diarahkan pada sikap yang bertanggung jawab dan masuk akal. Penanaman nilai demokrasi dapat dimulai dengan sikap menghargai perbedaan. Siswa diajak untuk mencapai keputusan bersama secara terbuka dan saling menghormati. Hal tersebut merupakan dasar dari sikap demokratis.

Arief. S. Sadiman (2001: 2-4) menyebutkan bahwa sekolah yang menerapkan nilai-nilai demokrasi harus memenuhi beberapa indikator sebagai berikut.

1. Kurikulum yang fleksibel dapat dikembangkan oleh guru, dan mata pelajaran yang dapat dijadikan sebagai media sosialisasi nilai demokrasi.
2. Menggunakan buku sumber yang beragam, tidak hanya pada satu sumber saja.
3. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terwujudnya nilai demokrasi, seperti tempat duduk yang memudahkan ruang gerak siswa, perpustakaan yang berwarna-warni sehingga menimbulkan keinginan pada siswa untuk menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar, lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif.
4. Guru yang bersikap demokratis. Guru dapat menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak menjadi satu-satunya sumber belajar, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis.
5. Proses pembelajaran yang demokratis, seperti a) menempatkan siswa menjadi pribadi yang unik dengan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa, b) pembelajaran bersifat individual dengan artian setiap anak mendapatkan penanganan sesuai kemampuan yang dimilikinya, c) sistem percepatan sesuai kemampuan siswa, d) memberikan kebebasan kepada siswa melakukan hal yang diinginkan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, e) pembelajaran kelompok untuk melatih sosialisasi siswa, f) memberikan kesempatan pada siswa dalam mengemukakan pendapat

secara lisan maupun tertulis (metode pembelajaran), g) melibatkan siswa dalam menentukan kebijakan sekolah, h) grafik prestasi siswa untuk mengoreksi diri dan bersikap terbuka dalam mengakui kelemahan dan kekurangan diri, dan i) penilaian yang demokratis, tidak hanya prestasi dan sikap siswa yang dinilai, akan tetapi guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menilai guru.

John Dewey (Zamroni, 2001: 19) mengemukakan bahwa sekolah yang demokratis harus mendorong dan memberikan kesempatan semua siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan, dan melaksanakan rencana tersebut. Ruang kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan siswa untuk bersama-sama belajar menegakkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab. Kegiatan belajar mengajar harus menumbuhkan rasa saling menghormati dan persaudaraan antara siswa dan guru dalam mata pelajaran apapun. Interaksi guru dan siswa bukan sebagai subjek-objek, melainkan subjek-subjek yang sama-sama membangun karakter dan sikap dalam individu. Guru berperan dalam membangkitkan rasa ingin tahu, berkreasi dan berkarya di kalangan siswa agar kelak menjadi manusia yang mandiri.

Sekolah demokratis dikembangkan dengan pola pembinaan siswa. Guru harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa, tanpa membedakan antara yang pintar dengan yang belum pintar, tidak membedakan antara yang rajin dengan yang belum rajin, semua memperoleh perlakuan, walaupun bentuknya berbeda di antara keduanya. Siswa yang sudah pintar diberi pengayaan dan yang belum pintar terus dibimbing agar dapat mengejar kemampuan siswa yang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nilai demokrasi di sekolah diselenggarakan oleh seluruh warga sekolah mencakup kepala sekolah, guru, siswa dan karyawan sekolah. Pelaksanaan nilai demokrasi meliputi kurikulum yang dapat digunakan dalam media sosialisasi nilai demokrasi, buku sumber yang beragam, sarana dan pra sarana yang memadai, guru yang demokratis, siswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar, serta rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disiapkan untuk pembelajaran.

C. Pengertian Guru

Guru merupakan seseorang yang bertugas memberikan ilmu kepada orang lain. Ahmad D. Marimba (Hasbullah, 2006: 17) mengatakan bahwa guru atau pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Siapa pun dapat menjadi pendidik, karena pendidikan merupakan perbuatan sosial untuk mengembangkan pribadi anak didik menuju pribadi dewasa.

Sutari Imam Barnadib (Arif Rohman, 2009: 149) mengatakan bahwa pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Sependapat dengan Sutari Imam Barnadib, Langevelt (Arif Rohman, 2009: 149) mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang dengan sengaja membantu orang lain untuk mencapai kedewasaan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang

bertugas merencanakan dan melaksanakan tugas pembelajaran, dan menilai pembelajaran. Guru adalah sebuah profesi. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru harus memenuhi persyaratan seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah persyaratan kompetensi. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 10 tentang Guru dan Dosen, kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pentingnya kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, maka UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjabarkan keempat kompetensi guru sebagai berikut.

1. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah dalam mengelola interaksi pembelajaran bagi siswa.

2. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah yang berupa kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan siswa.

3. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah berupa penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

4. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar.

Tabel 1. Bagan Profil Kompetensi Pendidik Pendidikan Formal

No.	Kompetensi	Deskripsi
1.	Kompetensi Pedagogik	<ul style="list-style-type: none">• Pemahaman dan pengembangan potensi siswa.• Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran• Sistem evaluasi pembelajaran
2.	Kompetensi Kepribadian	<ul style="list-style-type: none">• Kemantapan pribadi dan akhlak mulia• Kedewasaan dan kearifan• Keteladanan dan kewibawaan
3.	Kompetensi Profesional	<ul style="list-style-type: none">• Penguasaan materi keilmuan• Penguasaan kurikulum dan silabus sekolah• Metode khusus pembelajaran bidang studi
4.	Kompetensi Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan berkomunikasi dan komputer• Pengetahuan umum

Sumber: Arif Rohman. 2009 hlm 153

Guru mempunyai peran yang sangat penting yaitu mendidik anak agar menjadi manusia yang berpengetahuan dan bermoral dalam tahap mencapai kedewasaannya. Menjadi seorang guru bukan merupakan hal yang mudah, terutama guru sekolah dasar. Usia anak yang masih dalam operasional konkret dan tahap meniru, membuat guru harus berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Seorang guru harus berperilaku baik agar dapat menjadi teladan bagi siswa.

Peter G. Beidler (Dede Rosyada: 2007: 113-115) menyebutkan bahwa guru yang baik yaitu guru yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mandiri sebagai bentuk menghargai siswanya dalam mengembangkan diri,

mempunyai tujuan yang sangat muluk meski tidak berhasil dalam pencapaiannya. Guru yang mempunyai sikap positif pada siswanya yang lambat belajar maupun nakal, guru yang tidak mempunyai waktu untuk bersantai karena waktunya habis digunakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswanya. Selain itu, guru yang membuka kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi baik tentang mata pelajaran tertentu maupun proses pembelajaran lainnya, membuat siswanya percaya diri, guru selalu memberikan motivasi, serta mendengarkan setiap perkataan siswa sebagai sikap menghargai pendapatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga pendidikan yang bertugas mengajar dan mendidik anak dalam mencapai kedewasaan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Guru menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan dalam pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai keempat kompetensi dasar mengajar. Guru selain bertugas untuk menyampaikan materi pelajaran, juga bertugas menyampaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai demokrasi salah satunya. Guru yang mampu mengajar dengan keramahan, memberikan kesempatan yang sama pada setiap siswa, menghargai pendapat siswa tanpa ada keberpihakan, maka guru tersebut mempunyai kepribadian demokratis. Guru yang demokratis akan mampu menanamkan nilai demokrasi kepada para siswa, selain itu guru yang dapat menerima keberagaman siswa, menghargai pendapat siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.

D. Kajian tentang Peserta Didik

Peserta didik atau yang sering disebut dengan siswa adalah orang yang menjadi subjek didik. Setiap peserta didik dilahirkan dengan segenap potensi, bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Peserta didik yang satu berbeda dengan peserta didik yang lain, mereka mempunyai karakter dan sifat masing-masing. Latar belakang keluarga yang berbeda menjadi faktor pembentukan sikap yang dimilikinya. Sekolah harus mampu mengembangkan sikap dan nilai yang dibawa peserta didik dari rumah ke sekolah. Oleh karena itu, pendidikan nilai di sekolah harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitarnya agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh siswa karena ketidakselarasan antara nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dengan yang diajarkan di sekolah.

Sutari Imam Barnadib (Arif Rohman, 2009: 105-106) mengatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Peserta didik sangat tergantung dan membutuhkan bantuan dari orang lain yang memiliki kewibawaan dan kedewasaan. Sebagai anak, peserta didik masih dalam kondisi lemah dan belum bisa hidup mandiri jika dibandingkan dengan orang dewasa, akan tetapi dalam dirinya terdapat potensi dan bakat-bakat yang luar biasa yang akan tumbuh berkembang melalui pendidikan.

Hasbullah (2006: 23) menyatakan bahwa anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Pengaruh yang diberikan bertujuan untuk

membina peserta didik agar dapat berdiri sendiri. Peserta didik membutuhkan bantuan pendidik dalam proses kedewasaannya, yaitu suatu keadaan di mana dia sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab akan dirinya, baik secara individual maupun sosial.

Peserta didik tidak lagi berperan sebagai objek didik, akan tetapi mereka adalah subjek didik yang mempunyai motivasi, semangat, keinginan, ekspresi, cita-cita, dan mempunyai perasaan. Peserta didik ingin mengembangkan diri agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan hidup yang dijumpainya dalam kehidupan. Umar Tirtarahardja Dan La Sulo (Arif Rohman, 2009: 107) menyebutkan ciri-ciri peserta didik yang harus dipahami oleh pendidik adalah sebagai berikut.

- a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga mereka dikatakan sebagai makhluk yang unik. Mereka memiliki potensi yang berbeda satu sama lain yang dibawanya sejak lahir.
- b. Individu yang sedang berkembang, selalu ada perubahan yang terjadi pada dirinya baik untuk kepentingannya maupun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Peserta didik membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan diri meskipun dia telah memiliki potensi dan bakat yang dimilikinya.
- d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Seorang anak mempunyai keinginan untuk memerdekakan diri. Oleh karena itu, guru

maupun warga masyarakat harus sedikit demi sedikit memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat mandiri.

E. Deskripsi Teori Kurikulum

Kurikulum memiliki beberapa pengertian, setiap ahli mengemukakan kurikulum berdasarkan pandangan masing-masing. Oemar Hamalik (2009: 3) menyatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Lebih lanjut Dakir (2010: 3) menyatakan bahwa:

kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan siswa untuk mencapai pendidikan.

Wina Sanjaya (2008: 10) mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi dan bahan pelajaran yang dimaksudkan adalah bahan pelajaran/materi pelajaran untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh sekolah (guru). Pengertian di atas menyatakan bahwa kurikulum mencakup dua hal yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru dan implementasi dari rencana yang telah disusun.

Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat ditentukan oleh guru. Kurikulum utama sudah ditentukan oleh pusat dan guru bertugas untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keadaan siswa dan kondisi lingkungan sekitar. Guru bertanggung jawab menyampaikan materi

pembelajaran dan memberikan pengalaman kepada siswa sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Guru dalam mengembangkan kurikulum hendaknya tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran saja, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran yang dilakukan. Pelaksanaan kurikulum akan maksimal apabila terjalin kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Selain itu, faktor sarana dan pra sarana juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana yang telah disusun oleh guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Kurikulum berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan pembelajaran dan proses pelaksanaannya.

F. Pengertian Sarana dan Pra Sarana

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh sarana dan pra sarana yang ada. Sarana dan pra sarana mencakup alat dan fasilitas serta lingkungan pendidikan sebagai pendukung proses pembelajaran. Suharno (2008: 30) mengungkapkan bahwa pengertian sarana dan pra sarana pendidikan sebagai berikut.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan pengertian dari pra sarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang

jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun sekolah, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah digunakan untuk olahraga, maka komponen tersebut merupakan sarana.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada pasal 45 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan pra sarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan siswa. Sarana dan pra sarana yang terdapat di sekolah harus dapat memfasilitasi perkembangan siswa, sehingga dapat memotivasi mereka untuk aktif dalam pembelajaran dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan pendidikan.

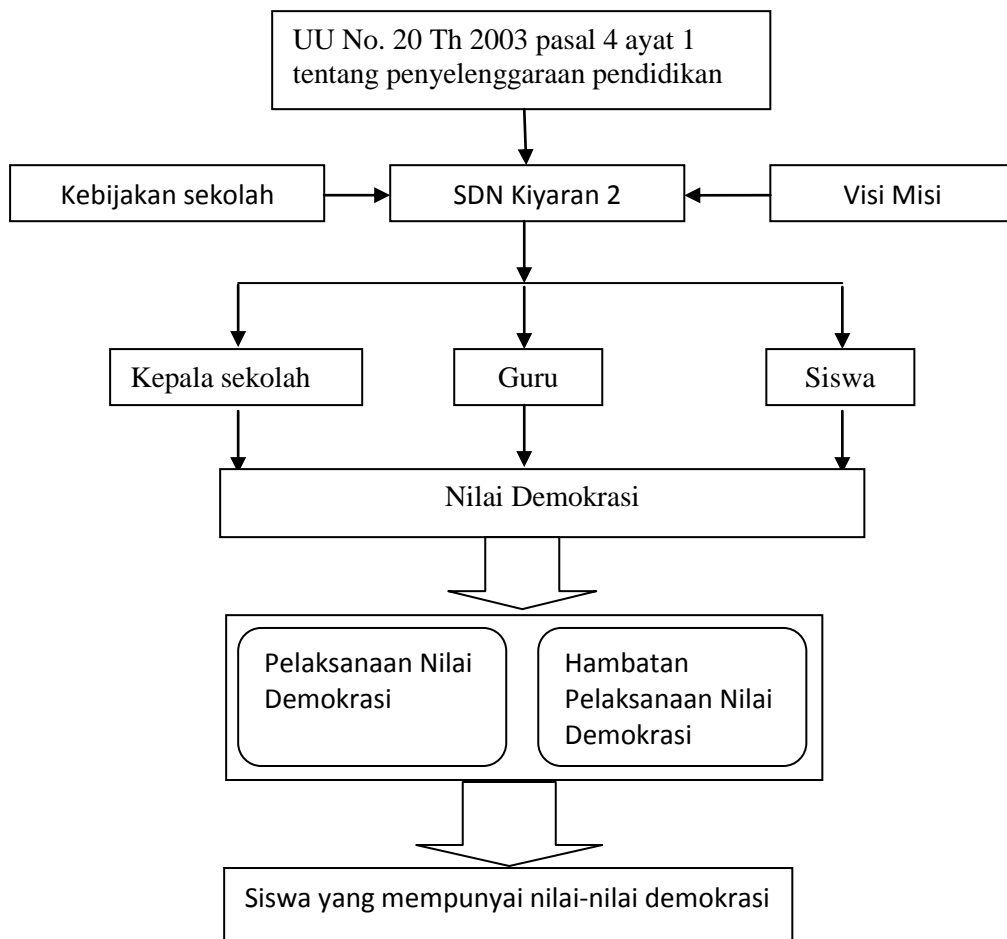
Nanik Sulistyowati (2006: 11) mengutarakan sasaran standarisasi sarana pendidikan SD meliputi alat peraga, alat pelajaran, media pembelajaran untuk semua bidang mata pelajaran di SD, sedangkan pra sarana pendidikan SD meliputi bangunan sekolah, perabot sekolah, dan sarana Tata Usaha (TU) sekolah. Sarana dan pra sarana pendidikan diharapkan memenuhi persyaratan dan bermutu sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku, penggunaannya dapat optimal dalam proses pembelajaran, penggunaan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana adalah segala fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar, sedangkan pra sarana adalah segala sesuatu yang tidak digunakan

dalam proses belajar mengajar, akan tetapi sebagai penunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Sarana dan pra sarana sangat penting untuk mendukung proses keberhasilan belajar mengajar, jika tanpa didukung dengan sarana dan pra sarana yang memadai tentu akan menghambat sekolah dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

H. Pertanyaan Penelitian

1. Pelaksanaan Nilai Demokrasi di SD Negeri Kiyaran 2
 - a. Mengapa SD Negeri Kiyaran 2 menanamkan nilai demokrasi kepada peserta didik?
 - b. Bagaimana pelaksanaan nilai demokrasi di SD Negeri Kiyaran 2 Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman?
2. Hambatan Pelaksanaan Nilai Demokrasi di SD Negeri Kiyaran 2
 - a. Mengapa guru masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan nilai demokrasi di SD Negeri Kiyaran 2 Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman?
 - b. Bagaimana cara guru meminimalisasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan nilai demokrasi di SD Negeri Kiyaran 2 Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman?